

PERANCANGAN PERMUKIMAN DAN RUMAH SEBAGAI MODUS PERTAHANAN MASYARAKAT BATAK TOBA

Himasari Hanan¹

¹ Program Studi Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung
hanan@ar.itb.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat tradisional Batak Toba merupakan masyarakat agraris yang menjadikan permukiman sebagai pusat kehidupan bermasyarakat dan tanah pertanian di sekitarnya sebagai sumber kehidupan mereka. Sebagaimana halnya masyarakat yang mengolah hasil bumi, maka tenaga kerja merupakan sumber daya yang krusial dalam menentukan keberlanjutan produktifitas lahan. Oleh karena itu kehidupan bermasyarakat banyak dikendalikan oleh tuntutan dalam produksi pertanian, sehingga fasilitas fisik dirancang untuk mendukung hal tersebut. Jumlah dan bentuk rumah dalam huta (permukiman) dikembangkan sesuai dengan sistem sosial yang berlaku, dan pembuka lahan pertanian menjadi tokoh panutan dalam kehidupan sehari-hari warga huta. Makalah ini akan membahas bagaimana permukiman Batak Toba mengembangkan pola pembelahan diri menjadi beberapa permukiman pada saat terjadi pertikaian atau persinggungan kepentingan dari warganya. Selanjutnya akan dibahas sejauh mana pola induk dari permukiman asal bertahan dan mengalami transformasi. Pembahasan dalam makalah akan mempersoalkan bahwa modus pertahanan dalam permukiman Batak Toba diselesaikan dengan pendekatan sosial yang dikemas dengan tata cara ritual dan hukum adat. Dalam makalah ini akan ditunjukkan bahwa konstruksi fisik dari suatu permukiman tradisional merupakan hal yang tak terpisahkan dari konstruksi sosial masyarakatnya.

Kata kunci: Batak Toba; permukiman berpagar; ruang terbuka; ketahanan sosial

2. PENDAHULUAN

Permukiman dan arsitektur vernakular merupakan kekayaan warisan budaya yang dapat ditemui di seluruh pelosok Indonesia. Sejauh ini kajian terhadap hal tersebut banyak dilakukan untuk menjabarkan nilai filosofis dan aspek teknis yang melatari bentuk bangunan dan perwujudan arsitekturnya. Tinjauan antropologis terhadap perumahan tradisional dan pengaruh iklim tropis terhadap bentuk bangunan merupakan hal yang paling banyak dibahas oleh para peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Penelitian yang ada lebih menempatkan permukiman dan arsitektur vernakular sebagai objek kajian dari kehidupan masa lalu daripada objek masa kini yang sedang mengalami pergumulan dalam mempertahankan keberlanjutannya. Permukiman dan arsitektur vernakular bagi sebagian masyarakat Indonesia di daerah perdesaan bukanlah merupakan artefak sejarah melainkan merupakan bagian dari kehidupan nyata dan kondisi aktual di masa kini.

Pola-pola permukiman di lingkungan masyarakat yang masih mempertahankan tradisi budaya setempat mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan yang terjadi di sekelilingnya. Persebaran budaya dari bangsa-bangsa di Asia Tenggara ke kepulauan Nusantara telah mempengaruhi cara-cara masyarakat setempat mempertahankan diri terhadap serangan dari orang luar. Keterbatasan teknologi dan ketersediaan bahan bangunan kemudian menentukan ragam bentuk dan proses perancangan permukiman dan arsitektur.

Bercocok tanam memberikan arti penting bagi kehidupan masyarakat tradisional yang agraris, di mana permukiman dilihat sebagai hal yang tidak terpisahkan dari kepemilikan lahan dan penguasaan atas sumber daya manusia. Permukiman vernakular menunjukkan bahwa kehidupan kolektif yang mendasari pembentukan ruang dalam permukiman hingga kini masih berlangsung. Oleh karena itu, kajian terhadap permukiman dan arsitektur vernakular perlu diperluas dari hal-hal yang menyangkut aspek fisik semata menjadi kajian yang melibatkan aspek sejarah sosial politik dari proses pembentukannya. Dengan harapan bahwa pemahaman dan pengetahuan atas faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pola permukiman sebagai pembentuk kehidupan bermasyarakat dapat ditingkatkan.

2. SISTEM KEPEMERINTAHAN DALAM PERMUKIMAN BATAK

Masyarakat Batak menganggap Sianjur Mula-mula yang berada di kaki gunung Pusuk Buhit (di seberang kota Pangururan Samosir) sebagai asal muasal dari perkembangan permukiman Batak. Menurut Simanjuntak (2012:149-153), masyarakat Batak merupakan keturunan Proto Malayan yang merantau mencari lahan baru ke bagian selatan dari benua Asia. Mereka memasuki pulau Sumatra melalui Barus, menelusuri Bukit Barisan, melewati Tele, untuk kemudian menetap di lereng Dolok Pusuk Buhit. Bangsa Proto Malayan ini memiliki sifat tertutup dan memilih untuk bermukim di daerah lembah, sungai atau pegunungan, di mana mereka dapat bercocok tanam dan berkebun. Mereka menikmati hidup terisolasi dan tidak terbuka terhadap pendatang yang tujuannya berdagang.

Di Sianjur Mula-mula Si Raja Batak berperan sebagai pimpinan pemerintahan dan keagamaan. Beliau dikaruniai 2 orang putera: Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon, dengan keahlian masing-masing. Guru mengembangkan keahlian meramu obat-obatan untuk kesehatan warganya sedangkan Raja mengembangkan keahlian di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan untuk sumber penghidupan warganya. Keturunan dari kedua putera ini kemudian membentuk masyarakat Batak yang mahir pada tiga bidang utama yaitu 1) pertanian dan perkebunan, 2) peternakan dan 3) kebugaran dan pengobatan. Bidang pertanian dikembangkan dengan mengutamakan pemahaman atas jenis tanaman dan tumbuhan andalan, pengenalan lahan dan musim. Bidang peternakan dikerjakan untuk memanfaatkan waktu luang di antara kegiatan bertani. Sedangkan kebugaran dan ilmu pengobatan dikembangkan untuk kepentingan pertahanan diri terhadap serangan musuh.

Keahlian dari kedua kakak beradik ini melahirkan jabatan Guru dan Raja yang mengendalikan kehidupan dan pergaulan dari masyarakat Batak yang merupakan keturunannya. Sistem kepemimpinan dalam masyarakat Batak oleh karenanya mencakup kepemimpinan dalam pemerintahan dan keagamaan. Selama beberapa puluh generasi keturunan Si Raja Batak dapat menciptakan pemerintahan yang kuat karena pemimpinnya selain dapat mengatur dan menertibkan warganya, juga menguasai ilmu pengobatan dan kedigdayaan. Namun demikian, pertumbuhan penduduk dan berkurangnya lahan pertanian memaksa keturunan Si Raja Batak pada saat itu untuk merantau ke berbagai daerah dan membuka permukiman baru. Mereka mendirikan permukiman baru dengan membuka hutan dan ladang apabila beberapa keluarga sepakat untuk menetap di suatu tempat. Sebagian membuka permukiman baru ke arah selatan dan sebagian ke arah timur. Daerah danau Toba merupakan daerah yang menjanjikan karena sawah dan dataran rendahnya mendukung kehidupan pertanian serta kedekatannya dengan sumber air.

3. KEPEMIMPINAN RAJA SEBAGAI SISTEM KETAHANAN SOSIAL

Sekitar tahun 300, keahlian memimpin yang diwariskan oleh Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon kepada keturunannya melahirkan bentuk kepemimpinan Raja Batak pertama yaitu Sori Mangaraja yang diperkirakan anggota dari marga Sagala (Simandjuntak, 2012:158). Setelah memerintah selama 90 keturunan Sori Mangaraja digantikan oleh raja berikutnya dari marga Sinambela yang memerintah selama 12 keturunan, dari Si Simangaraja I hingga XII. Masyarakat Batak sejak dahulu tidak mengenal sistem pemerintahan penguasa dalam bentuk kerajaan kecuali Si Singamangaraja yang mengangkat dirinya sebagai raja. Sebutan raja tidak dikaitkan dengan kedudukan dan kekuasaan seseorang dalam konteks kerajaan, melainkan merupakan sebutan penghormatan kepada lawan bicara (Aritonang, 2002:22). Sebutan Raja kepada Si Raja Batak diberikan oleh keturunannya sebagai suatu bentuk penghormatan, bukan dalam sikap rakyat yang menghamba kepadanya. Oleh karena itu Si Raja Batak tidak memiliki wilayah kerajaan dan tidak ada rakyat yang diperintah.

Masyarakat Batak walaupun tidak mengenal sistem penguasa, namun dalam menjalani kehidupan bersama selalu membutuhkan tokoh yang menjadi panutan atau pimpinan. Pada umumnya yang diakui sebagai pemimpin adalah orang yang dituakan dalam keluarga besar dan yang ditokohkan karena dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan anggota

yang lain. Kelebihan itu adalah mengerti ilmu pengobatan dan perkasa (dukun/ Datu) atau ilmu agama. Kelompok masyarakat yang kecil biasanya dipimpin oleh anggota keluarga yang lebih tua, sedangkan dalam kelompok masyarakat yang besar dipimpin tokoh adat atau tokoh marga (Simandjuntak, 2012:170-172).

Pusat pemerintahan Raja Si Singamangaraja I-XII berada di Bakkara yang sering didatangi masyarakat untuk berobat. Raja sering melaksanakan upacara adat untuk menolak bala agar kebersamaan di antara masyarakat dapat terjaga dan masyarakat merasa aman dan hidup dengan penuh kasih dan saling tolong menolong. Upacara adat wajib diikuti oleh setiap anggota dan bersifat mengikat dengan tujuan agar tercapai kebersamaan dan kedamaian di antara seluruh masyarakat. Upacara adat yang diadakan oleh raja pada hakekatnya adalah mengutamakan kepentingan bersama dari seluruh anggota masyarakat di mana Raja hanya berperan untuk menguatkan kebersamaan tersebut.

Si Singamangaraja XII (1845-1907) dikenal secara nasional bukan karena kepemimpinan beliau pada saat menjadi Raja Batak melainkan karena diangkat menjadi pahlawan nasional setelah dia wafat pada masa pemerintahan presiden Soekarno. Jasa-jasa beliau adalah sebagai pemimpin masyarakat Batak yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda hingga terbunuh pada tahun 1907. Sehubungan dengan wilayah kekuasaannya sebagai suatu kerajaan, hingga saat ini belum ada catatan sejarah yang dapat membuktikan. Catatan sejarah dari Tomé Pires¹⁰ pada tahun 1444 menyebutkan bahwa ada banyak raja dan tuan tanah di pedalaman Sumatra namun mereka tidak melakukan perdagangan dengan orang luar sehingga tidak banyak informasi yang didapatkan tentang wilayah kekuasaan mereka (Bonatz, Dominik, et.al. 2009:109). Oleh karenanya hanya dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Si Simangaraja XII pada saat itu dihormati oleh masyarakat Batak karena kharismanya sebagai Raja Batak yang perkasa, ahli pengobatan dan sebagai pimpinan keagamaan (Bonatz, et.al. 2009:106-107).

Penelusuran catatan sejarah menunjukkan bahwa wilayah kekuasaan seorang Raja Batak di mana masyarakatnya kemudian bermukim tidak pernah dikenali secara jelas. Penelitian sejarah hanya mendapatkan bahwa pelabuhan Barus pada pantai barat pulau Sumatra pernah berjaya sebagai pintu keluar pengangkutan komoditas kamfer dan benzoin pada abad 8-13. Oleh karenanya diperkirakan bahwa wilayah permukiman masyarakat Batak mulai berkembang karena adanya perdagangan kamfer dan bensin ini. Keberadaan Padang Lawas sebagai situs peribadatan agama Budha di dekat sungai Pane dan Baruman tercantum dalam catatan sejarah dalam Bahasa Batak. Dengan demikian diperkirakan wilayah permukiman Batak berada di sekitar situs tersebut dan pernah berinteraksi dengan masyarakat yang beragama Budha (Bonatz, et.al. 2009:109). Sedangkan pelabuhan Kota Cina di pantai timur dekat Medan diperkirakan berperan juga dalam mengembangkan wilayah permukiman masyarakat Batak.

Catatan sejarah dari Mendes Pinto, orang Portugis yang mengunjungi Sumatra Utara sekitar tahun 1539, menggambarkan bahwa masyarakat yang ada di Sumatra Utara mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan wilayah yang ditempati dan bukan berdasarkan kelompok etnik atau agama yang dianutnya. Pada saat penyebaran agama Islam dari Aceh di sepanjang pantai utara Sumatra berlangsung, terjadi penolakan dari kelompok masyarakat yang rajanya berkedudukan di pantai barat. Bentuk pemerintahan yang menyerupai kerajaan di daerah pedalaman harus berhadapan dengan masyarakat beragama Islam yang melakukan perdagangan maritim. Raja Batak harus memperkuat kedudukannya dengan menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh setempat dan memindahkan permukimannya ke pedalaman. Bersamaan dengan itu, kerajaan di daerah pesisir berakhir dan masyarakat yang mengundurkan diri ke pedalaman karena menentang kesultanan Aceh disebut sebagai orang Batak (Bonatz, et.al. 2009:111-112).

¹⁰ Tomé Pires adalah orang Portugis yang pertama kali melakukan perjalanan ke Malaysia dan Indonesia sekitar tahun 1512-1515. Pires adalah seorang apoteker yang memberikan banyak catatan tentang geografi, etnografi, sejarah, botani, ekonomi dan perdagangan di Asia Tenggara.

Perluasan kesultanan Aceh menyebabkan terpisahnya masyarakat Batak tidak saja dengan masyarakat yang beragama Islam, melainkan juga dengan negara kota pelabuhan di pantai. Sejak itulah diperkirakan masyarakat Batak sebagai satu kesatuan pemerintahan kerajaan menjadi tercerai berai. Kelompok masyarakat Batak Karo dan Batak Simalungun diantaranya membentuk sistem pemerintahannya sendiri dan memisahkan diri dari keturunan nenek moyangnya. Dengan perkembangan waktu masyarakat Batak juga bermigrasi ke berbagai arah membentuk kelompok masyarakat Batak Pakpak, Batak Angkola dan Batak Mandailing. Sedangkan kelompok masyarakat Batak Toba bermukim di pulau Samosir dan sebelah selatan dan barat daya danau Toba.

4. SISTEM MARGA SEBAGAI SISTEM PERTAHANAN BUDAYA

Masyarakat Batak yang memiliki budaya tertutup mengembangkan struktur kemasyarakatan yang berlandaskan pada sistem kekerabatan sebagai suatu keluarga besar. Mereka menganut sistem patrilineal yang menggunakan nama nenek moyangnya sebagai marga bagi anak dan keturunannya. Marga mengandung nilai kultural dan genealogical bagi persatuan dan kesatuan masyarakat, dan prinsip persaudaraan menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat. Penyandang marga yang sama merupakan saudara seperasaan dalam kesedihan maupun kegembiraan sehingga anak saudara semarga akan diperlakukan sebagai anak sendiri. Apabila ada salah satu anggota marga yang menyimpang maka menjadi kewajiban bagi anggota lain untuk memperingatkannya.

Pada awalnya masyarakat Batak hanya terdiri dari satu marga, namun setelah anggotanya melakukan perkawinan dengan berbagai kelompok masyarakat lain maka berkembanglah pola kehidupan masyarakat asal. Keinginan untuk mempertahankan keutuhan sebagai keluarga besar serta nilai-nilai kebersamaan dan keperdulian kemudian melahirkan tata cara adat yang mengatur dan menetapkan ketertiban kehidupan bermasyarakat. Pemimpin adat disebut Mangaraja Adat yang bertugas mengarahkan pelaksanaan acara adat yaitu bentuk, jenis, sifat dan orang-orang yang terlibat.

Marga sangat penting bagi keluarga Batak karena melalui marga seseorang akan mengetahui kedudukannya dalam acara adat maupun kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui posisi masing-masing maka seseorang dapat mengetahui bagaimana harus bertutur sapa dengan orang lain. Sistem kekerabatan yang berlandaskan semangat kebersamaan menuntut kepatuhan dari anggotanya sehingga dibuat aturan tentang marga yang dapat dan tidak dapat dinikahi. Ketentuan adat melarang perkawinan antar keluarga dengan marga yang sama.

5. PERMUKIMAN SEBAGAI SISTEM PERTAHANAN FISIK

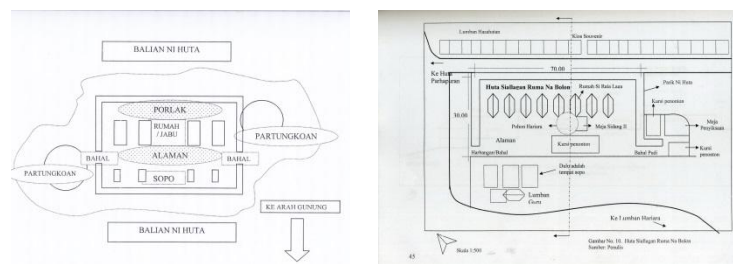
Permukiman masyarakat Batak dibangun dengan memperhatikan beberapa hal seperti topografi, kondisi lahan dan aspek keamanan. Permukiman Batak memiliki dua jenis pola, yaitu di daerah lembah gunung atau di lereng bagian atas dari punggung bukit. Daerah lembah memiliki lahan datar luas yang dibatasi oleh dinding lembah yang terjal, dan pada dasarnya mengalir sungai yang menjadi sumber pengairan. Sedangkan daerah lereng gunung memiliki tanah yang subur dengan sumber air melimpah, sehingga menguntungkan untuk kegiatan bercocok tanam. Umumnya permukiman Batak didirikan di daerah yang subur untuk bercocok tanam karena masyarakat Batak merupakan masyarakat petani. Di antara kegiatan pertanian mereka memelihara ternak untuk menambah penghasilan dan pengolahan lahan pertanian.

Sebuah permukiman Batak menjadi satuan produksi dan konsumsi dari lahan pertanian yang dimilikinya. Lahan pertanian yang ada dikerjakan secara kolektif oleh warga setempat dan hasilnya menjadi milik kolektif warga permukiman tersebut. Unit permukiman dengan demikian menjadi sangat menentukan dalam mempertahankan perolehan hasil produksi pertanian. Membangun sebuah permukiman oleh karenanya adalah ditujukan untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan tempat tinggal yang aman dari serangan musuh dan orang-orang asing. Permukiman merupakan suatu lingkungan binaan

yang bersifat eksklusif. Mereka yang berada di luar permukiman sering dianggap sebagai musuh dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup warga, sehingga tidak jarang terjadi perang antar permukiman yang mengakibatkan balas dendam secara turun menurun.

5.1. Pagar keliling

Pagar menjadi unsur pertama yang dibangun ketika mendirikan permukiman baru. Setiap permukiman Batak membuat pagar di sekelilingnya untuk melindungi warganya dari serangan musuh. Dengan adanya pagar tersebut, setiap permukiman memiliki otonomi untuk mengatur siapa yang berhak berdiam dalam permukiman. Mekanisme pengendalian terhadap warga ditetapkan oleh pemimpin permukiman tersebut. Pagar keliling setinggi 2-3 meter dibuat dari bahan batu atau tanah. Dinding pagar keliling dapat mencapai 1.5 meter tebalnya dan kadang-kadang dibuat dua lapis. Di atas dinding ditanami pohon bambu berduri di sebelah luar dan pohon lain di sebelah dalam yang berfungsi sebagai peneduh (Setiawan, 2010:148). Dalam kepercayaan masyarakat Batak, dinding batu sebagai pagar sering kali diasosiasikan dengan benteng magis yang menangkal pengaruh negatif dari roh jahat atau wabah penyakit. Secara klimatologis, dinding keliling permukiman yang terbuat dari batu melindungi warga dari pengaruh angin yang berubah-ubah dari arah danau Toba. Di bagian luar dinding pagar dibuat parit yang berfungsi sebagai saluran drainase untuk menjaga agar halaman permukiman tidak tergenang air pada saat hujan deras. Dari segi keamanan, keberadaan parit keliling dapat menghambat atau memperlambat serangan musuh yang ingin menyerang permukiman. Bagian dalam sebuah permukiman disebut sebagai *huta* sedangkan bagian luarnya disebut sebagai *balian ni huta*¹¹.



Gambar 1. (a) Stereotipe permukiman berpagar; (b) Huta Siallagan

Sumber: (a) Aritonang, 2002; (b) Aritonang, 2002

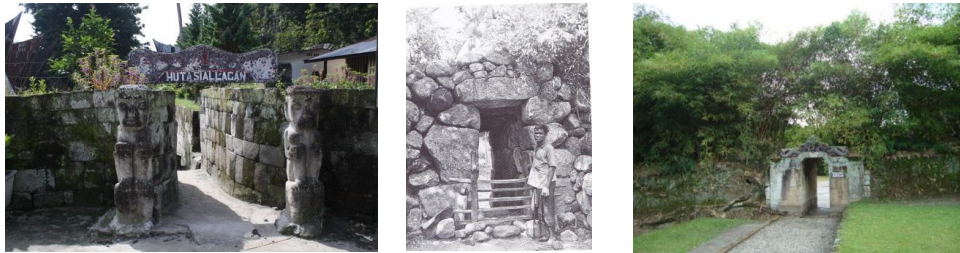
Konsep pagar ini menyebabkan pembangunan permukiman Batak kurang memperhatikan konteks lingkungan fisik sekitarnya. Pembangunan permukiman tidak memperhatikan struktur spasial yang ada sebelumnya sehingga permukiman Batak cenderung berdiri sendiri dan menciptakan suatu pola baru yang fleksibel mengikuti ketersediaan lahan. Besaran permukiman pun aneka ragam mengikuti kebutuhan praktis dari jumlah warga yang harus ditampung. Akibatnya antara permukiman satu dengan yang lain tidak memiliki keterkaitan pola, yang kemudian berdampak terhadap lanskap lingkungan yang terpecah-pecah dan menyulitkan terbentuknya jaringan sistem aksesibilitas kawasan.

5.2. Akses yang terbatas

Pembatasan akses untuk menangkal serangan dari luar mengarahkan perencanaan tata letak bangunan dan perancangan bentuknya dalam permukiman. Pintu masuk permukiman dibuat dalam ukuran yang kecil sehingga memaksa orang untuk menunduk pada saat memasuki permukiman. Hal ini diperkuat dengan mitos yang menyatakan bahwa seorang tamu pada saat berkunjung harus menghormati tuan rumah dengan menunduk. Hiasan yang ditempatkan di atas pintu masuk ditujukan untuk menangkal roh jahat yang akan mengganggu warga. Konsep akses yang terbatas berlanjut di dalam permukiman, di mana tamu

¹¹ Gultom Rajamarpodang dalam Aritonang, 2002

datang melalui ruang terbuka yang terlihat dari setiap rumah yang ada. Ruang terbuka ini selain merupakan ruang milik bersama untuk pelaksanaan kegiatan warga, juga merupakan jalur sirkulasi ke setiap bagian permukiman dan menuju masing-masing rumah tinggal.



Gambar 2. Pagar permukiman (a) Huta Siallagan; (b) Bakkara; (c) Simamindo
Sumber: (a) Penulis, 2011; (b) Sibeth, 1991; (c) Penulis, 2011

Konsep aksesibilitas yang menjamin keamanan penghuni diterapkan juga pada tata letak bangunan rumah tinggal. Rumah tinggal hanya memiliki satu pintu masuk dari arah depan rumah yang menghadap ke arah ruang bersama. Rumah hanya dapat dimasuki melalui tangga kayu yang ditempatkan di bagian tengah kolong rumah atau disandarkan pada bagian tengah fasade depan rumah yang mudah dilepas. Tangga ini selalu berjumlah ganjil: 5, 7 atau 9 anak tangga. Dalam rumah Batak dikenal dua tipe tangga, yaitu tangga jantan (*balatuk tunggal*) dan tangga perempuan (*balatuk ni boru*). Tangga jantan terbuat dari sebatang kayu utuh yang dilubangi, sedangkan tangga perempuan terbuat dari papan kayu yang dibentuk menjadi tangga (Susetyo, 2009:221). Pada saat musuh datang menyerang, tangga akan ditarik ke dalam rumah sehingga tidak seorangpun memiliki akses ke dalam rumah. Lubang jendela berukuran kecil sehingga tidak memberikan peluang orang luar untuk memasuki rumah melalui jendela.



Gambar 3. Tangga masuk rumah (a) Huta Siallagan; (b) Janji Martahan; (c) Lumban Simarmata
Sumber: (a) Penulis, 2011; (b) Penulis, 2011; (c) Penulis, 2011

5.3. Ruang terbuka untuk ketahanan sosial

Permukiman Batak selalu memiliki ruang terbuka yang luas di tengah permukiman, yang menjadi orientasi dari seluruh bangunan yang ada dan menjadi ruang pengikat bagi permukiman tersebut. Ruang terbuka ini disebut sebagai *alaman*, yang tidak ditanami rumput dan berfungsi sebagai ruang serba guna bagi kegiatan warga. Masing-masing rumah tidak memiliki batasan fisik yang tegas, dan kegiatan di luar ruangan dari masing-masing penghuni rumah dilakukan di ruang terbuka ini. Pada masa panen, warga menggunakannya sebagai tempat menjemur hasil pertanian; pada saat ada upacara adat ruang tersebut menjadi pusat kegiatan ritual di mana tari-tarian dan pertunjukan musik ditempatkan; pada kegiatan sehari-hari ruang ini menjadi tempat bermain anak-anak dan tempat berkumpul warga.

Seluruh warga permukiman merupakan suatu keluarga besar karena mereka berasal dari keturunan satu marga. Kegiatan yang berkaitan dengan pertanian atau upacara ritual

selalu melibatkan seluruh warga, oleh karenanya semangat kebersamaan selalu melandasi penataan ruang dalam permukiman. Keberadaan ruang terbuka yang berfungsi sebagai ruang bersama memperlihatkan pola kehidupan kolektif dari masyarakat Batak yang melahirkan mekanisme kontrol sosial yang sangat kuat. Disamping itu, keamanan dan keselamatan warga permukiman selalu menjadi faktor penting dalam pembangunan permukiman, sehingga hal ini menjadi perhatian dan tanggung jawab dari seluruh warga. Pintu masuk permukiman yang hanya satu dan jalur sirkulasi menuju masing-masing rumah hanya melalui ruang terbuka tadi menyebabkan tidak mungkin kedatangan orang luar tanpa diketahui oleh warga.



Gambar 4. Penggunaan ruang bersama (a) Huta Siallagan; (b) Huta Siallagan; (c) Lumban Simarmata
Sumber: (a) Penulis, 2011; (b) Penulis, 2011; (c) Penulis, 2011

5.4. Perluasan permukiman untuk keberlanjutan wilayah kekuasaan

Suatu unit permukiman Batak disebut sebagai *huta* dan *Mangaraja Huta* atau *Raja ni Huta* adalah sebutan penghormatan bagi seseorang yang dituakan dalam *huta* atau pembuka *huta*. Sesuai dengan tradisi pemerintahan dan kepemimpinan dalam masyarakat Batak, maka orang yang terpilih sebagai pemimpin *huta* adalah orang yang menguasai tata cara adat. *Raja ni Huta* dan keturunannya memiliki kekuasaan atas kepemilikan tanah, dan kewenangan atas pengelolaan lahan dan sumber daya manusia yang berada dalam wilayah teritorial *huta* tersebut. Mengingat wilayah kekuasaan yang relatif terbatas dan warga adalah keturunan dari pembuka *huta*, maka *raja ni huta* ini lebih merupakan *pater familias* (bapak-keluarga) daripada seorang raja dalam konteks sistem kekuasaan¹². Seorang *raja ni huta* akan bangga apabila keturunannya dapat mendirikan huta-huta baru karena dengan begitu terbentuk wilayah-wilayah kekuasaan baru dengan pimpinannya masing-masing.

Sebuah *huta* merupakan cikal bakal bagi perkembangan sistem kemasyarakatan marga atau cabang marga. Adat istiadat Batak melarang perkawinan antar sesama marga, di mana perkawinan antara dua kelompok marga berarti membangun suatu ikatan antara dua *huta*. Kelompok marga yang memberikan istri mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada kelompok marga yang menerima istri. Seorang *raja ni huta* yang berkuasa di wilayah teritorialnya tetap memiliki *hula-hula* (keluarga istri) yang harus dihormati dan dilayani. Dalam suatu keluarga, suami dan anak laki-laki merupakan keluarga yang semarga; *hula-hula* adalah keluarga semarga dari istri dan saudara laki-laki istri; sedangkan boru adalah keluarga semarga yang lain dari anak perempuan dan pasangannya.

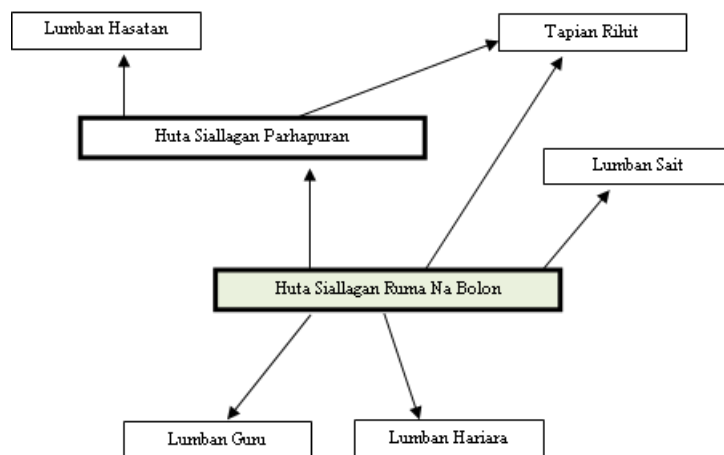
Setiap orang Batak akan menjadi bagian dari ketiga sistem sosial tersebut dan mengalami peran yang berbeda-beda bergantung pada situasinya. Dengan demikian, seseorang tidak selalu berada dalam posisi yang dihormati, karena pada saat berada dalam keluarga istrinya maka ia harus menghormati *hula-hula* nya. Ketentuan adat yang berlaku tidak memungkinkan terbentuknya suatu status sosial yang dominan dalam masyarakat sekalipun seseorang merupakan pimpinan suatu wilayah. Tradisi sistem marga yang dipegang teguh membentuk suatu sistem jaringan sosial yang saling melibatkan, sehingga

¹² Lance Castles dalam Aritonang, 2002

proses pengambilan keputusan berlangsung partisipatoris di antara anggota keluarga besar (keturunan suami, istri dan besan).

Beberapa orang dari warga suatu permukiman dapat memisahkan diri untuk membentuk permukiman baru setelah disepakati oleh permukiman asal (*huta*). Pendirian permukiman baru dimungkinkan apabila salah satu dari anak keluarga inti sudah berkeluarga dan mandiri. Permukiman baru yang muncul sebagai perluasan dari suatu *huta* disebut sebagai *lumban*. Tata letak bangunan dan susunan ruang luar dari sebuah *lumban* sama dengan sebuah *huta*, hanya saja *lumban* tidak memiliki pagar keliling. *Lumban* tidak memiliki *raja ni hutu* dan pimpinan permukiman disebut sebagai *pengetua lumban*. *Lumban* tidak melaksanakan upacara adat sebagaimana yang dilakukan *huta* dan mengakui serta menghormati kepemimpinan *huta* asalnya.

Nama permukiman Batak dapat mengikuti nama marga yang mendirikan, tanda-tanda alam, kekhasan dari pimpinan, atau pekerjaan dari penghuni. *Huta Siallagan* terbentuk karena pendirinya adalah Si Raja Laga yaitu orang yang pandai berlaga. Keturunan kedua dari Siallagan membuat kapur sirih sehingga kemudian permukimannya disebut sebagai *Huta Siallagan Parhapuran* (Siallagan yang mengerjakan batu kapur). Sebuah *Lumban* dinamai *Lumban Hariara* karena di depan pintu masuk permukiman terdapat pohon Hariara. Sedangkan *Lumban Guru* terbentuk karena di dalamnya berdiam seorang guru yang disegani.



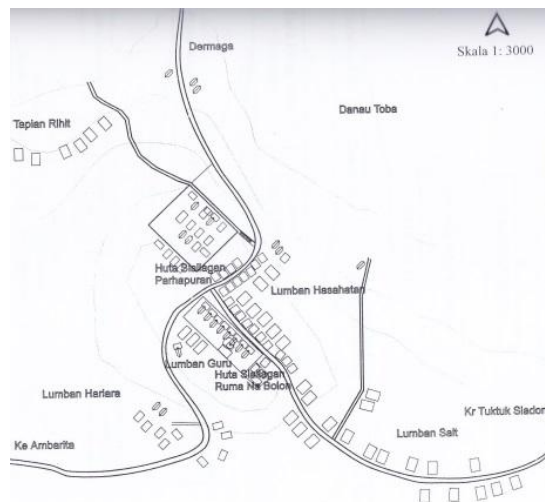
Gambar 5. Diagram Perluasan Huta Siallagan

Sumber: Aritonang, 2002

Huta Siallagan didirikan sekitar 18 generasi lalu oleh *Si Raja Laga* yang memiliki 2 orang anak. Adat istiadat Batak menetapkan bahwa pengalihan kepemilikan rumah orang tua diberikan kepada anak tertua, karena itu *Huta Siallagan Ruma Na Bolon* kemudian menjadi wilayah kekuasaan anak pertama. Pada saat anak kedua dewasa dan mandiri, sebuah *huta* baru didirikan di sebelah *huta* yang lama dan dinamakan *Huta Siallagan Parhapuran*. Dalam perkembangannya *Huta Siallagan Ruma Na Bolon* mengalami beberapa kali perluasan di mana terbentuk *Lumban Guru*, *Lumban Hariara* dan *Lumban Sait*. Besaran dari masing-masing *lumban* yang terbentuk tidak sama, mulai dari terdiri dari 4 hingga belasan rumah. *Tapien Rihit* adalah bekas tempat mandi dan mencuci yang kemudian tumbuh secara alamiah menjadi tempat bermukim dari beberapa orang keturunan *Huta Siallagan Ruma Na Bolon* dan *Huta Siallagan Parhapuran*.

Pada umumnya sebuah *huta* ditandai dengan keberadaan pohon beringin atau hariara di dekat pintu gerbang, di mana di bawah pohon ditempatkan tempat duduk yang digunakan warga untuk bermusyawarah (*partungkoan*). Dalam *huta Siallagan Ruma Na Bolon* pohon beringin berada di tengah permukiman. Tata letak rumah dalam *huta* mengikuti urutan kedudukan dalam keluarga di mana rumah *raja ni hutu* berada di tengah-tengah dan di samping kiri dan kanan rumah raja adalah rumah dari anak laki-laki. Anak perempuan

menempati rumah di sebelah anak laki-laki, sedangkan sisi terluar adalah posisi rumah untuk budak atau pendatang yang diberi ijin oleh *raja ni huta* untuk bermukim dalam huta tersebut. Bangunan rumah disusun dalam deretan dan ditempatkan berhadap-hadapan dengan *sopo/lumbung* (lihat gambar 1). Sebaliknya sebuah *lumban* tidak lagi mengikuti tata aturan perletakan rumah dalam *huta* sehingga masing-masing rumah dapat ditempatkan sesuai dengan kondisi fisik yang ada. Dalam permukiman *lumban* tidak lagi didirikan bangunan *sopo*. Besaran rumahnya dapat beragam di mana penempatannya ada yang berorientasi pada jalan raya; sebagian lagi mengikuti kontur tapak yang ada; dan ada pula yang terbentuk secara alamiah mengikuti perkembangan fungsi seperti yang terjadi di *Tapian Rihit*.



Gambar 6. Peta lokasi perluasan Huta Siallagan
Sumber: Aritonang, 2002

6. KESIMPULAN

Permukiman berpagar merupakan artefak budaya Nusantara yang memiliki sejarah yang panjang. Pemagaran lingkungan permukiman memungkinkan berkembangnya konsep ruang terbuka bersama yang memberikan tempat untuk mewujudkan semangat kebersamaan di antara warga dalam mencapai kehidupan kolektif yang dicita-citakan. Keberadaan pagar menekankan adanya identitas kelompok dalam upaya membedakan diri dengan lingkungan fisik dan sosial di sekelilingnya. Permukiman berpagar secara tidak langsung mendorong warganya untuk dapat memenuhi kebutuhan kelompoknya secara mandiri dan membangun jejaring sosial agar dapat mempertahankan eksistensinya. Dalam permukiman Batak Toba permukiman berpagar ini didukung oleh sistem pemerintahan yang otonom sehingga batasan fisik menjadi terpadu dengan batasan wilayah territorial kekuasaan. Pembatasan wilayah territorial secara fisik yang digabungkan dengan sistem kekerabatan menjadi modus pertahanan sosial-politik dan ekonomi yang sangat efektif dalam permukiman Batak Toba.

Pola permukiman vernacular yang berpagar ini perlu dikaji lebih jauh secara mendalam dalam hubungannya dengan pengembangan pola permukiman modern di lingkungan perkotaan yang semakin banyak menerapkan pola pagar keliling. Pola permukiman berpagar akan menimbulkan segregasi sosial-ekonomi apabila kewilayahannya ditentukan berdasarkan strata sosial dan ekonomi warganya. Masyarakat vernakular Batak Toba menyadari dampak sosial yang ditimbulkan oleh modus pertahanan fisik yang dibentuknya, dan dapat mengimbangi kelemahan pola bermukim yang ada dengan membangun sistem jejaring sosial yang kokoh melalui sistem marga. Pada satu sisi permukiman berpagar dapat memenuhi harapan untuk menjamin keamanan warganya dan menciptakan semangat kebersamaan dalam komunitas, namun pada sisi yang lain dapat menciptakan ketegangan sosial yang baru hingga konflik etnik.



REFERENSI

- Aritonang, Emmy Ria, 2002, Perubahan Fungsi dan Tata Ruang pada Kampung dan Rumah Tinggal di Huta Siallagan Samosir, *Tesis Program Magister Arsitektur ITB*
- Bonnatz, Dominik, et.al, 2009, From Distant Tales, Archaeology and ethnohistory in The Highlands of Sumatra, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne
- JC Vergouwen, 2004, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LKIS, Jakarta,
- PaEni, Mukhlis, 2009, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Arsitektur, Rajawali Pers, Jakarta
- Setiawan, Taufiqurraman, Bentuk adaptasi lingkungan pada permukiman tradisional di danau Toba, *Berkala Arkeologi Sangkhakala* 13 (25) Mar 2010: 145 – 153
- Sibeth, Achim, 1991, *The Batak*, Thames and Hudson, London
- Simandjuntak, Bungaran Antonius, 2012, *Konsepku Membangun Bangsa Batak: Manusia, Agama dan Budaya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Susetyo, Sukawati, Tinjauan arsitektur rumah adat Batak Toba di Pulau Samosir, *Berkala Arkeologi Sangkhakala* 12 (24) Nov 2009: 219 – 228